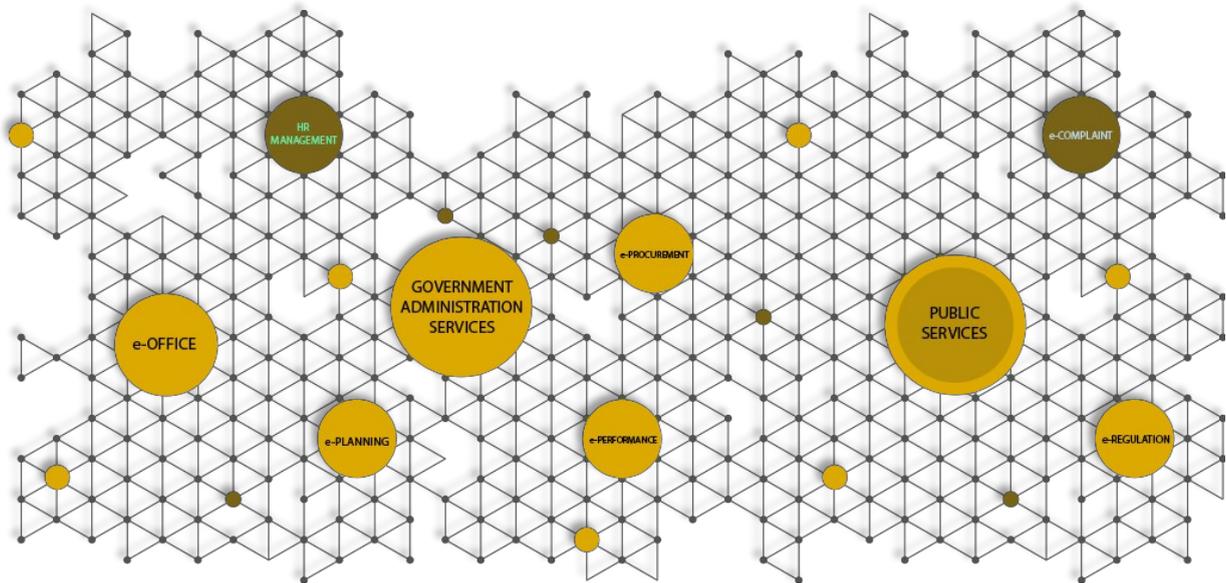




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



# INDEKS SPBE

## PEMERINTAH KOTA BATAM

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 20 Januari 2021

Deputi Bidang Kelembagaan  
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020

## Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

### Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

<b>1. Rintisan</b>	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
<b>2. Terkelola</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
<b>3. Terstandar-disasi</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
<b>4. Terintegrasi dan Terukur</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
<b>5. Optimum</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

### Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

<b>1. Informasi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
<b>2. Interaksi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
<b>3. Transaksi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
<b>4. Kolaborasi</b>	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
<b>5. Optimalisasi</b>	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2.26	3.19	3.14	2.37	2.56	2.04	2.43
Domain Kebijakan	2.07	2.94	2.92	2.14	2.94	1.86	2.18
Kebijakan Tata Kelola	2.01	2.75	2.99	2.15	2.42	1.79	2.18
Kebijakan Layanan	2.11	3.07	2.87	2.13	2.50	1.91	2.18
Domain Tata Kelola	1.95	2.87	2.97	2.32	2.87	1.70	2.08
Kelembagaan	1.88	2.90	2.93	2.28	2.04	1.64	2.02
Strategi & Perencanaan	1.97	2.66	2.98	2.25	2.44	1.74	2.10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.98	2.99	3.00	2.40	2.29	1.72	2.12
Domain Layanan SPBE	2.48	3.43	3.29	2.47	3.43	2.26	2.69
Administrasi Pemerintahan	2.62	3.52	3.40	2.62	2.82	2.42	2.80
Layanan Publik	2.23	3.28	3.09	2.20	2.58	1.98	2.49

**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**

	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	3,11
	Domain Kebijakan Internal SPBE	2,76
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,86
	Kebijakan Internal Layanan SPBE	2,70
	Domain Tata Kelola SPBE	2,57
	Kelembagaan	3,00
	Strategi dan Perencanaan	2,50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,33
	Domain Layanan SPBE	3,48
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,57
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33

**Kekuatan dan Kelemahan**

**A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**

Aspek Kebijakan telah dipenuhi oleh Pemerintah kota Batam dengan baik, terutama pada Kebijakan Internal tim pengarah SPBE, inovasi proses bisnis terintegrasi, serta kebijakan internal integrasi sistem aplikasi

- **Kekuatan**

Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE didukung kebijakan penganggaran TIK Pemerintah Daerah Kota Batam yang diatur dalam Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Dinas KOMINFO (Perwali No 54 Tahun 2016), yang mengatur penyelarasan seluruh muatan rencana induk SPBE yang terintegrasi dengan OPD lain di Pemerintah kota Batam, dan antar lembaga. Kebijakan internal tentang Pusat Data ada dalam Perwako No. 6.A tahun 2006 tentang Pengembangan Egoovernment dilingkungan Pemerintah Kota batam, serta sejumlah SOP yg terkait Pusat Data menunjukkan bahwa kebijakan satu data telah kuat dan melayani semua unit kerja, serta terintegrasi dengan pusat data nasional.

- **Kelemahan**

Kebijakan internal perlu dipertegas dan diperluas agar mencakup seluruh instansi/OPD sesuai layanan dan tata kelola yang disiapkan. Telah ada kebijakan Rencana Induk SPBE/ Rencana Induk Egoovernment yang diatur dalam Perwako No 06.A tahun 2006, namun belum secara konkrit menetapkan visi-misi, arsitektur, dan peta jalan SPBE, karena masih mengacu model e-Gov yang lama. Penyusunan rencana induk SPBE yang baru telah dilakukan namun masih berupa draft.

**B. Kebijakan Internal Layanan SPBE**

Pemerintah Kota Batam memiliki Kebijakan Internal yang baik pada Layanan manajemen Kinerja serta Layanan pengaduan Publik

- **Kekuatan**

Kekuatan SPBE Kota Batam terletak pada Kebijakan internal sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan Perwali No 13 Thn 2017 tentang Musrenbangdidukung SK Walikota No KPTS.31/HK/I.2018 tentang tim pelaksana e-planning. Kebijakan penggunaan aplikasi SIPD sesuai surat

Setda Batam No 135/Kominfo/1/2020 tentang kesiapan server SIPD Pemerintah kota Batam, yang menunjukkan kesiapan Pemko Batam mengadopsi SIPD yang mendukung keterlibatan semua OPD yang ada secara terintegrasi dalam sistem manajemen perencanaan berbasis elektronik.

- Kelemahan

Kebijakan JDIH masih mengacu Perda No 7 Tahun 2019, namun Perda tersebut bukan mengatur JDIH berbasis Elektronika.

#### C. Kelembagaan

Kebijakan kelembagaan telah terpenuhi dengan baik, mencakup Tim Pengarah SPBE berdasarkan SK Walikota No 315/HK/VII/2020, serta telah ada peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- Kekuatan

Telah ada identifikasi proses bisnis oleh SEKDA serta pembentukan tim pengarah SPBE sehingga pemerintah kota sudah siap untuk melakukan transformasi digital.

- Kelemahan

Tim Pengarah baru terbentuk di bulan Juli 2020, belum tampak hasilnya, demikian pula identifikasi proses bisnis belum diikuti detail alur transaksinya

#### D. Strategi dan Perencanaan

Aspek Perencanaan dan Strategi di Kota Batam ditunjukkan dengan adanya Masterplan e-Gov tahun 2013, rencana Induk SPBE versi 2020 sedang dalam tahap finalisasi (masih draft). Sudah terdapat koordinasi penyusunan anggaran, yang mencakup seluruh bidang pemerintahan.

- Kekuatan

Pemerintah Kota Batam telah memiliki Masterplan SPBE sejak tahun 2013 yang menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk mempersiapkan SPBE yang sedang dalam proses revisi di tahun 2020. Perencanaan Penganggaran dan Keuangan telah dilakukan dengan terintegrasi dan dievaluasi tahunan.

- Kelemahan

Dokumen Masterplan SPBE hendaknya disusun ulang mengikuti kaidah atau kelengkapan dokumen masterplan SPBE

#### E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek Tata Kelola TIK telah dipenuhi oleh Pemerintah kota Batam dengan Prosedur pengendalian Data Centre tersedia lengkap, dengan bukti SOP-SOP pengelolaan data centre serta ada bukti pengelolaannya secara terpusat, serta telah terintegrasi, mencakup sebagian dari rencana integrasi aplikasi. Telah ada aplikasi berbagai pakai dengan aplikasi umum seperti aduan publik secara elektronik, aplikasi perencanaan, SIPD, dan aplikasi e-office.

- Kekuatan

Aspek TIK belum menunjukkan kekuatan yang signifikan, terutama masih kurang lengkapnya kelengkapan organisasi serta SOP

- Kelemahan

Baru sebagian layanan/sistem/aplikasi yang diintegrasikan meskipun TIK mendukung, Bukti dokumen tentang perencanaan aplikasi belum memadai

#### F. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan Manajemen Keuangan serta Layanan Manajemen Kinerja di Pemerintah Kota Batam telah memenuhi kebutuhan internal Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik.

- Kekuatan

Kekuatan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik secara umum sudah berjalan penuh di Pemerintah kota Batam dengan berbagai aplikasi yang inovatif, berbasis web dan mobile. Layanan Manajemen kepegawaian, Manajemen Perencanaan, dan Manajemen Penganggaran, serta Layanan Pengadaan telah terintegrasi dengan instansi-instansi terkait.

- Kelemahan

Dokumentasi aplikasi sangat terbatas, tidak ada versioning yang menunjukkan tahapan perbaikan / updating aplikasi untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan.

#### G. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemerintah Kota Batam telah memenuhi seluruh indikator Layanan Publik SPBE, ditunjukkan dengan

layanan yang lengkap cakupannya pada Layanan Pengaduan Publik, Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta Layanan Whistle Blowing System yang didukung aplikasi online berbasis mobile dan web.

- Kekuatan

Layanan-layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam telah dikembangkan dengan aplikasi-aplikasi web dan aplikasi mobile yang terintegrasi, serta terhubung pula dengan online payment system dan marketplace. Layanan publik perpajakan dengan bukti kolaborasi aplikasi PBB dan BPHTB telah terintegrasi, demikian pula layanan Dispendukcapil berbasis elektronik, dengan aplikasi mobile, yang memiliki integrasi data dengan layanan lain, terutama yang terkait dengan NIK. Demikian pula dengan layanan pajak bumi dan bangunan terintegrasi dengan sistem pembayaran online yang dapat diakses dari platform lain di luar pemerintah kota Batam.

- Kelemahan

Dokumentasi evaluasi aplikasi layanan publik masih perlu ditingkatkan agar evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan, mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

## Rekomendasi

Secara prinsip, SPBE di Kota Batam telah berjalan baik dan menunjukkan perbaikan pada berbagai aspek di tahun 2020. Layanan-layanan SPBE untuk proses bisnis, layanan administrasi maupun layanan publik telah berjalan dengan baik didukung data centre yang sangat memadai. Proses digitalisasi proses telah mencakup seluruh aspek SPBE. Peraturan-peraturan yang menjadi kebijakan SPBE perlu dievaluasi dan dilengkapi agar cakupannya mendukung integrasi layanan SPBE antar OPD dan antar institusi. Kebijakan internal terkait infrastruktur TIK agar diperkuat dengan dukungan dokumen-dokumen acuan yang memenuhi standar masterplan TIK / masterplan pengembangan SPBE. Kekuatan SPBE Kota Batam terutama pada kesiapan Pusat Data mengelola aplikasi-aplikasi layanan administrasi pemerintah daerah dan aplikasi umum yang diimplementasikan dengan aplikasi mobile dan aplikasi web, seperti E-Office, SIMPEG, E-Planning, SIPD, LPSE, PBB, BPHTB, serta Disdukcapilbisa. Ke depannya, infrastruktur kebijakan dan tata kelola perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku. Kebijakan yang perlu diprioritaskan antara lain Kebijakan Internal terkait Rencana Induk SPBE, Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, Layanan Naskah Dinas, Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Whistle Blowing System, layanan publik.